

ABSTRAK

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia, terdapat dua jenis pajak di Indonesia yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu penyumbang terbesar dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dampak dari Covid-19 banyak mengalami tunggakan tunggakan perpajakan PKB dikarenakan banyak wajib pajak yang terkena imbas dari terjadinya pandemi, pada sektor perekonomian yang sangat tidak pasti terhadap kelangsungan hidup para wajib pajak. Hal ini dialami oleh KB.Samsat Bangkalan dalam kurun 2 (Dua) Tahun terakhir

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat Bangkalan serta Penegakan Hukum Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Pajak Kendaraan Bermotor. Manfaat penelitian bagi instansi yaitu memberikan pandangan dan masukan untuk kualitas kinerja Kantor Bersama Samsat Bangkalan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pajak kendaraan bermotor. Bagi penulis sebagai penelitian serta kesempatan untuk mempelajari dampak mengenai kesadaran wajib pajak,serta faktor dan penghambat dalam pencapaian target pajak kendaraan bermotor.

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis *social legal research* atau sering disebut dengan riset tentang hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Implementasi PERGUB JATIM No. 116 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA PROV JATIM No. 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Tentang Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Bersama Samsat Bangkalan sudah dilaksanakan dengan baik, sudah menghimbau terkait PKB ini wajib untuk dibayar, Namun masih terjadi banyak hambatan-hambatan salah satunya terkait kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, KB Samsat Bangkalan juga telah melakukan beberapa strategi dan melaksanakan program-program yang ada untuk mengatasi terkait hambatan-hambatan tersebut. Serta Penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor Kb.Samsat Bangkalan menerapkan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor serta denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan

ABSTRACT

Taxes are the largest state revenue in financing development in Indonesia, there are two types of taxes in Indonesia, namely central taxes and regional taxes. One of the biggest contributors to local taxes is Motor Vehicle Tax (PKB). The impact of Covid-19 has experienced many arrears in PKB tax arrears because many taxpayers have been affected by the pandemic, in the economic sector which is very uncertain about the survival of taxpayers. This has been experienced by KB.Samsat Bangkalan in the last 2 (two) years

The purpose of this study was to determine the Implementation of Regulations Concerning Obligation to Pay Motor Vehicle Taxes at the Bangkalan Samsat Joint Office and Law Enforcement Against Taxpayer Non-Compliance in Motor Vehicle Taxes. The benefits of research for agencies are providing views and input for the quality of the performance of the Bangkalan Joint Samsat Office in increasing taxpayer compliance with motor vehicle taxes. For writers as research and an opportunity to study the impact on taxpayer awareness, as well as factors and obstacles in achieving motorized vehicle tax targets.

Research conducted using the type of social legal research or often referred to as research on empirical law using an empirical juridical approach. Based on the research results it is understood that the Implementation of PERGUB JATIM No. 116 of 2010 concerning Implementation Guidelines for PERDA PROV JATIM No. 9 of 2010 concerning Regional Taxes Concerning the Obligation to Pay Motor Vehicle Taxes the Bangkalan Samsat Joint Office has been implemented properly, it has appealed that this PKB is obligatory to be paid, however there are still many obstacles one of which is related to public awareness in paying taxes, the Bangkalan Samsat KB also has carried out several strategies and implemented existing programs to overcome these obstacles. As well as law enforcement against taxpayer non-compliance in motor vehicle tax Kb.Samsat Bangkalan applies administrative sanctions in the form of motor vehicle tax fines and mandatory contribution fines for road traffic accident funds.

Keywords: Taxpayer Compliance, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions